# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan. Sebab kemiskinan membahayakan terhadap ketenteraman masyarakat, dan dengan kemiskinan, maka banyak problematika dalam kehidupan seperti kelaparan, penyakit, kebodohan dan lemahnya kemampuan mengeksplorisasi sumber materi dan insani di daerah manapun yang di dalamnya tersebar kemiskinan, yang selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat sarana produksi di daerah-daerah yang miskin dan menurunnya pemasukan, perawatan kesehatan dan pendidikan. oleh karena itu kegiatan pembangunan yang diselenggarakan diberbagai Negara pada hakikatnya untuk menanggulangi kemiskinan.[1] Apabila pengurangan kemiskinan dapat dilanjutkan terus, maka akan memperkuat salah satu dari trilogi pembangunan, yaitu stabilitas ekonomi. Sehingga, pembangunan dapat dilanjutkan terus-menerus.

Dalam suatu perekonomian, pendapatan merupakan faktor yang terpenting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan, karena dengan adanya pendapatan kegiatan perekonomian dapat berjalan. Dalam artian ekonomi pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga, perusahaan yang dapat berupa gaji dan upah, sewa, bunga serta keuntungan / profit.[2]

---

[1] Muhtar Saman, *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Puspita Swara, 1999), Cet. ke- 1, h. 1.

[2] Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 91.

Pendapatan dapat diartikan sebagai balas jasa dari suatu tindakan produktif yang ia lakukan.[3] Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan rill berupa barang.

Ada beragam sumber pendapatan keluarga, dikarenakan anggota keluarga yang bekerja melakukan beragam kegiatan usaha dan atau masing-masing anggota rumah tangga mempunyai kegiatan yang berbeda atau satu sama lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi keragaman pendapatan keluarga adalah penguasaan faktor produksi. Pendapatan itu sendiri diperoleh sebagai hasil bekerja atau jasa asset dan sumbangan dari pihak lain.

Sementara itu pendapatan rumah tangga dapat didefenisikan sebagai jumlah nyata yang dapat disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam rumah tangga.[4]

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan dan keterpurukan, disebabkan oleh perubahan sosial di antaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

---

[3] Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 486.
[4] Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 48.

Masyarakat dikatakan miskin menurut Todaro adalah bagi mereka yang bertempat di daerah pedesaan dan memiliki kegiatan utama di bidang pertanian dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.[5] Sedangkan menurut Emil Salim mereka yang berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat tidur dan lain-lain.[6]

Melihat keadaan tersebut, maka pemerintah Indonesia pada tahun 2013 menyelenggarakan suatu program bantuan kepada masyarakat miskin. Program bantuan itu salah satunya Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, kecelakaan dan korban kejahatan. Atau dengan kata lain program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial makanya diberikan berbagai bantuan.

Bantuan yang berupa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diberikan kepada masyarakat miskin adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin. Pemberian dana diupayakan merata di tiap kabupaten. Di Provinsi Riau hampir seluruh kabupaten memperoleh dana kompensasi tersebut.

Kecamatan Kuok merupakan salah satu kecamatan yang berada di

---

[5]Hadi Prayitno dan Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 102.

[6]Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 327.

Kabupaten Kampar yang terdiri dari 9 desa dan salah satunya Desa Pulau Jambu yang mana diharapkan setiap desa memperoleh dana bantuan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kecamatan Kuok seperti halnya daerah lain di Indonesia merupakan daerah agraris, di mana sebagian besar atau mayoritas penduduk desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok hidup di sektor pertanian dan diasumsikan penduduk setempat termasuk masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang mana pada umumnya bekerja sebagai petani, buruh dan pedagang.

Islam menganjurkan adanya persediaan kebutuhan pokok. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap negeri demi terciptanya keadilan sosial. Terdapat dalil yang menunjukkan tugas kekhalifahan atau pemerintahan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

Artinya : " *Dan dialah yang menjadikanmu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* "[7](Q.S Al-An'am 6: 165)

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil, karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Seperti dalam memberikan bantuan itu hendaknya

[7] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 150.

berlaku jujur dan tangung jawab karena merupakan amanah.

Secara umum program bantuan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) bagi penduduk miskin mempunyai tujuan yang sangat baik, namun pelaksanaan dana bantuan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) banyak mengalami permasalahan diantaranya menyangkut sasaran. Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) juga dinikmati oleh masyarakat mampu sehingga yang miskin semakin miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nilai program itu tercatat mencapai Rp 400.000 untuk jangka waktu dua bulan. Adapun syarat dan ketentuan dari penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah sebagai berikut:

1. Kepala rumah tangga pemegang kartu ini beserta seluruh anggota rumah tangganya berhak menerima program perlindungan sosial.
2. Kartu ini ditunjukkan pada saat pengambilan manfaat program Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
3. Ketidaksesuaian nomor kartu keluarga asli dengan nomor KK yang ada di KPS, tidak menghapuskan hak rumah tangga atas manfaat program.
4. Kartu ini tidak dapat dipindah tangankan.
5. Kartu ini harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu.[8]

Namun di lapangan, di Desa Pulau Jambu ditemukan beberapa kasus program bantuan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang salah sasaran, di mana bantuan tersebut juga dinikmati oleh masyarakat mampu.

---

[8] http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/KPS-Poster%20all-A3-final.pdf, tanggal 7 April 2015.

Hal ini diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan ibu Ita salah satu masyarakat Desa Pulau Jambu, ia mengatakan bahwa program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) belum jelas kriteria penerimanya. Menurutnya Desa Pulau Jambu banyak dari masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut dan banyak juga dari masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan, seharusnya bantuan tersebut diberikan kepada yang berhak menerima, bukan kepada yang tidak berhak menerima.[9]

Permasalahan di atas membuat penulis tertarik mengadakan penelitian yang lebih lanjut ke dalam bentuk tulisan ilmiah yang berjudul **"Metode Penetapan Penerimaan Bantuan Dalam Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Menurut Ekonomi Islam".**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Permasalahan ini difokuskan kepada metode penetapan penerimaan bantuan dalam program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Menurut Ekonomi Islam.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penetapan penerimaan bantuan dalam program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan program Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

[9] Ita, Masyarakat Penerima Bantuan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), *wawancara*, Desa Pulau Jambu, tanggal 20 Januari 2015.

di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap metode penetapan penerimaan bantuan dalam program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk megetahui metode penetapan penerimaan bantuan dalam program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.
   b. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.
   c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap metode penetapan penerimaan bantuan dalam program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.
2. Manfaat Penelitian
   a. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis dan pembaca khususnya masyarakat luas.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan kita tentang Kartu Perlindungan Sosial.
   c. Penilitian ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk penulisan Skripsi dalam menyelesaikan studi pada Program S1 Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

## E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok, karena di desa ini ditemukan masyarakat yang mampu dapat menerima bantuan dana Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Sedangkan masyarakat miskin banyak yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok yang terdaftar sebagai penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah metode penetapan penerimaan bantuan dalam program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok menurut ekonomi Islam.

3. Populasi Sampel

Untuk populasi dalam penelitian ini adalah aparat Desa Pulau Jambu yang terdiri dari 6 orang, RT / RW terdiri dari 8 orang dan 224 KK masyarakat penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok. Adapun sampel dalam penelitian ini penulis mengambil sebanyak 2 orang aparat desa yang berkaitan dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), 8 orang RT / RW dan 37 KK dengan menggunakan teknik *Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.[10] Dalam menentukan jumlah sampel dihitung berdasarkan *Rumus Slovin*.[11]

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = nilai presisi (0.15)

Berdasarkan rumus yang diperoleh jumlah sampel (n) untuk berapa banyak jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut:

$$n = \frac{224}{224\ (0.15)^2 + 1} = \frac{224}{6.04} = 37.08 \text{ dibulatkan menjadi } 37$$

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.[12] Sumber dari data primer adalah aparat desa, RT / RW dan masyarakat penerima bantuan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan aparat Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

b. Data sekunder yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa

---

[10] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed.Revisi, Cet. ke-2, h. 75.

[11] Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 71.

[12] V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis , dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), Ed 1, Cet ke-1, h. 73.

data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.[13]

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalah sebagai berikut:

a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut.[14]
b. Wawancara yaitu tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan masyarakat penerima bantuan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan aparat desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.[15]
c. Kuesioner yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden dalam bentuk angket serta beberapa alternatif pilihan jawaban.[16]
d. Studi kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.[17]

6. Metode Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik

---

[13] Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dalam Penelitian,* (Yogyakarta: ANDI, 2010), h. 190.

[14] Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), Cet. ke-7, h. 125.

[15] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya,* (Jakarta: Kencana, 2008), Ed. 1, Cet. ke-2, h. 108.

[16] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi,Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,* (Jakarta: Kaencana, 2011), Ed. 1, Cet. ke-1, h.139.

[17] Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Ed. 1, Cet. ke-1, h. 14.

kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Induktif yaitu meggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat menggambarkan secara utuh dan serta dipahami untuk diambil suatu kesimpulan.[18]

## F. Sisitematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca memahami penelitian ini, maka penulis penyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan antara lain mencakup Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang lokasi penelitian, yang meliputi Letak Geografis dan Demografis

[18] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), Cet. ke-2, h. 352.

Desa Pulau Jambu, keadaan penduduk, pendidikan penduduk, sarana prasarana, pekerjaan penduduk, agama dan budaya masyarakat.

**BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Kartu Perlindungan Sosial (KPS), kriteria atau syarat penerima bantuan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), program pengentasan kemiskinan, konsep keluarga sejahtera dan jaminan perlindungan sosial dalam perspektif ekonomi Islam.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan bagaimana metode penetapan penerimaan bantuan dalam program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok, dampak pelaksanaan program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap metode penetapan penerimaan bantuan dalam program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.